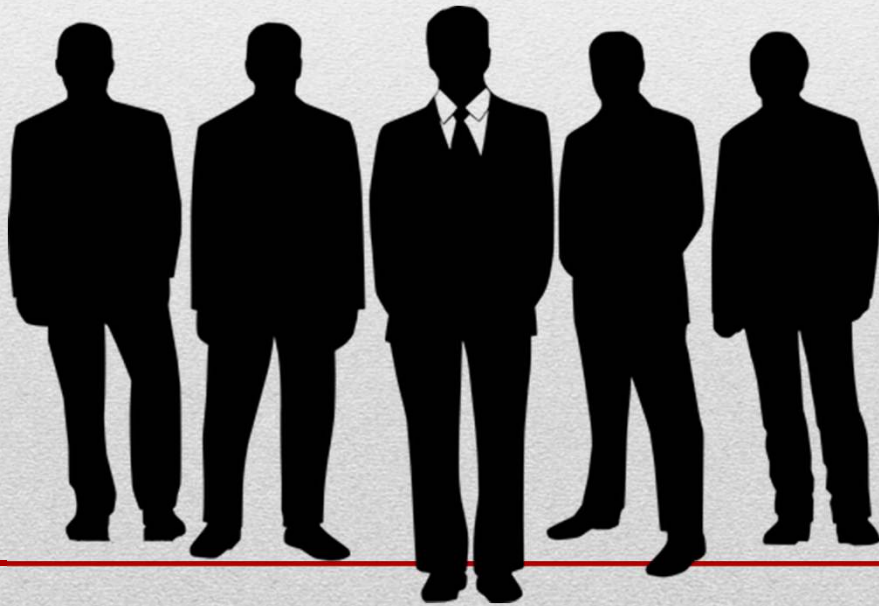


PEMBERDAYAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN



GAMBARAN BPP

- 1) BPP DAPAT DIGAMBARAKAN DARI KEBERADAAN PERTANIAN DI WILAYAH KECAMATAN
- 2) AKTIFITAS KELOMPOK TANI DAPAT DILIHAT DARI AKTIFITAS BPP
- 3) KLASIFIKASI BPP MERUPAKAN GAMBARAN KEMAMPUAN BPP

PERTANYAAN

- APA KLASIFIKASI BPP TEMPAT SAUDARA BEKERJA?
- KAPAN TERAKHIR BPP SAUDARA MELAKUKAN PENILAIAN KEMAMPUANNYA (KLASIFIKASI)?
- PENTINGKAH KALSIFIKASI TERSEBUT DILAKUKAN?

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Balai Penyuluhan Pertanian, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan.

TUGAS BPP

- 1) Memfasilitasi Penyusunan program** penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan penyuluhan** berdasarkan program penyuluhan;
- 3) Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;**
- 4) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan** pelaku utama dan pelaku usaha;
- 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh** (PNS, Swadaya, Swasta) melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- 6) Melaksanakan proses pembelajaran** melalui unit percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

TUGAS BPP

- 1) Memfasilitasi penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/ kota;
- 2) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan kecamatan;
- 3) Menyediakan akses terhadap penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar;
- 4) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan usahatani, pengembangan sejenisnya, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran di BP3K secara berkelanjutan; dan;
- 6) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

FUNGSI BPP

**SEBAGAI TEMPAT PERTEMUAN PARA PENYULUH,
PETANI/PELAKU UTAMA, DAN PELAKU USAHA DALAM
RANGKA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BPP.**

MANAJEMEN OPERASIONAL

1. Struktur organisasi BPP.
2. Pembagian tugas pokok dan fungsi.
3. Programa penyuluhan kecamatan.
4. Jadwal pelatihan di BPP.
5. Jadwal latihan dan kunjungan penyuluh, dan
6. Jadwal supervise penyuluh.

AKTIVITAS

- 1) Penyampaian dan penyebaran informasi inovasi teknologi.
- 2) Fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha.
- 3) Kaji terap/percontohan.
- 4) Pengembangan model usaha Tani.
- 5) Pemberian Rekomendasi dan aksesibilitas sumber teknologi.
- 6) Fasilitasi kerja sama peneliti, penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- 7) Koordinasi dan Musyawarah Rembug Tani.
- 8) Koordinasi Mimbar Sarasehan.

LANJUTAN

- 9) Menumbuhkembangkan kepemimpinan kewirausahaan, kelembagaan petani, dan kelembagaan ekonomi petani.
- 10) Perakitan materi/media dan alat bantu penyuluhan spesifik lokasi.
- 11) Layanan terpadu hulu – hilir (*One Stop Service*) dan layanan informasi berbasis teknologi informasi (*cyber extension*).
- 12) Layanan klinik konsultasi agribisnis.
- 13) Pemutakhiran data, dan
- 14) Supervisi, evaluasi, dan pembinaan kinerja penyuluh.

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

JENIS DATA DAN INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA DI BPP MELIPUTI DATA DAN INFORMASI TENTANG SUMBER DAYA ALAM, SUMBER DAYA MANUSIA, KELEMBAGAAN PETANI, KEADAAN DEMOGRAFIS YANG DIPERLUKAN DALAM PERENCANAAN KEGIATAN PENYULUHAN DI WILAYAH BPP.

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

- 1) Sumber Daya Alam, terdiri atas keadaan geografis, topografi wilayah, iklim, jenis tanah, luas lahan, luas tanam, produktivitas dan produksi usaha tani, dan komoditas unggulan yang berpeluang memiliki daya saing tinggi serta kerentanan terhadap bencana alam, kalender tanam, Dampak Perubahan Iklim (DPI), Indek Pertanaman (IP).
- 2) Sumber Daya Manusia, terdiri atas jumlah dan kapasitas SDM penyuluh (Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas –Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta).

- 3) Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani data mencakup nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, latihan yang pernah diikuti, target produksi dll, Kelembagaan petani meliputi jumlah kelompok tani/ Gapoktan, asosiasi petani, kelembagaan ekonomi petani (koperasi tani/ Badan Usaha Milik Petani), dan jejaring kemitraan usaha, dengan rincian kapasitas usaha masing-masing klasifikasi kelompok tani.
- 4) Keadaan demografis wilayah BP3K terdiri atas jumlah penduduk, keragaman, mata pencaharian, tingkat pertumbuhan pada pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, tingkat partisipasi, dan produktivitas.

DUKUNGAN PEMBIAYAAN

Dukungan pembiayaan dalam pengelolaan BP3K dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Swasta, dan Swadaya.

INDIKATOR KEBERHASILAN FASILITASI BPP

- 1) Peningkatan kelas klasifikasi BPP
- 2) Penambahan jumlah PP swadaya dan PP Swasta
- 3) Dihasilkan matrik perencanaan pendampingan penyuluhan tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan melalui rembug tani
- 4) Peningkatan kelas kemampuan kelembagaan petani
- 5) Peningkatan produksi dari target yang ditetapkan oleh masing-masing penyuluh
- 6) Pelaksanaan demplot yang diikuti oleh adopsi teknologi anjuran oleh petani
- 7) Jumlah penyuluh yang melakukan evaluasi kinerja
- 8) Jumlah kelembagaan petani yang melakukan jejaring dan kemitraan.

9 (SEMBILAN)

INDIKATOR KEBERHASILAN PENYULUH PERTANIAN

- 1) TERSUSUNNYA PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN
- 2) TERSUSUNNYA RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUHAN PERTANIAN
- 3) TERSUSUN PETA WILAYAH UNTUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKALITA
- 4) TERDESIMINASINYA INFORMASI TEKNOLOGI PERTANIAN SECARA MERATA
- 5) TUMBUH KEMBANGNYA KEBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA
- 6) TERWUJUDNYA KEMITRAAN USAHA PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA YANG MENGUNTUNGGKAN
- 7) TERWUJUDNYA AKSES PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA KE LEMBAGA KEUANGAN, INFORMASI, SARANA PRODUKSI
- 8) MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS AGRIBISNIS KOMODITAS UNGGULAN DI WILAYAHNYA
- 9) MININGKATKATNYA PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN PELAKU UTAMA

KLASIFIKASI BPP

Klasifikasi BPP adalah penilaian kelas kemampuan BPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) kelas, yaitu BPP kelas :

- 1)Pratama,
- 2)Madya,
- 3)Utama, dan
- 4)Aditama.

TUJUAN KLASIFIKASI BPP

diperolehnya kelas kemampuan BPP guna dijadikan dasar dalam mengembangkan serta meningkatkan kapasitas BPP terutama dalam melayani penyuluhan di wilayah kecamatan

MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN KELAS KEMAMPUAN BPP



**PENILAIAN KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
di KECAMATAN
KEMENTERIAN PERTANIA**

PROVINSI	:	
KABUPATEN	:	
KECAMATAN	:	
NAMA BP3K/BPP	:	
KEPALA BP3K/BPP	:	
NO. TELP/HP	:	

NO.	VARIABEL
A.	ASPEK KELEMBAGAAN
1.	DASAR PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
2.	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
	A. PENYUSUNAN PROGRAMAN PENYULUHAN
	1) Identifikasi masalah perilaku pelaku utama (PRA/Kaji Tindak);
	2) Identifikasi kebutuhan pengembangan usaha pelaku utama (RDK/RDKK);
	3) Rumusan Programa Penyuluhan.
	B. PELAKSANAAN PENYULUHAN BERDASARKAN PROGRAM PENYULUHAN
	1) Fasilitasi pembelajaran teknologi (budidaya, pasca panen, pengolahan, pemasaran, kepemimpinan dan manajemen agribisnis);
	2) Mengiaktarkan kemudahan (sarana produksi, akses permodalan, dan akses pemasaran);
	3) Penerapan metode penyuluhan (kunjungan lapangan, demonstrasi lapangan, sekolah lapangan, kursus, dll);
	4) Supervisi, evaluasi, dan pelaporan;
	C. PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI TEKNOLOGI, SARANA PRODUKSI, PEMBIAYAAN DAN PASAR
	1) Jumlah dan jenis informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar, dan kebijakan;
	2) Ketersediaan sarana pengumpulan data dan informasi (IT, cyber extension, kaji terap, kaji tindak, apresiasi, dan konsultasi);
	3) Kemasan informasi (liptan, brosur, folder, dll);

NO.	VARIABEL
A.	ASPEK KELEMBAGAAN
	D.FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PELAKU UTAMA
	1) Keragaan (jumlah dan klasifikasi), kelembagaan petani (poktan, gapoktan), kelembagaan ekonomipetani dan Posluhdes;
	2) Pemetaan kondisi kelembagaan (kemampuan manajemen, permodalan, skala usaha, dankemitraan);
	3) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan;
	E.FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PNS, PENYULUH SWADAYA DAN PENYULUH SWASTA
	1) Ketersediaan data penyuluh (PNS,Swadaya, dan Swasta);
	2) Ketersediaan data inventarisasi kebutuhan materi untuk peningkatan pengetahuan,keterampilan, dan sikap);
	3) Ketersediaan rencana peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya, dan Swasta;
	4) Ketersediaan rencana sertifikasi keahlian/kompetensi penyuluh PNS, Swadaya, dan Swasta.
	F.PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN MELALUI PERCONTOHAN DAN PENGEMBANGAN MODEL USAHA
	1) Jumlah dan jenis percontohan dan pengembangan model usaha padi (demplot/perorangan (0,1 Ha), demfarm/kelompok (5 Ha), demarea/gapoktan (50 Ha), demunit/asosiasi (1.000 Ha)

NO.	VARIABEL	
A.	ASPEK KELEMBAGAAN	
	F.	PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN MELALUI PERCONTOHAN DAN PENGEMBANGAN MODEL USAHA
	1)	Jumlah dan jenis percontohan dan pengembangan model usaha padi (demplot/perorangan (0,1 Ha), demfarm/kelompok (5 Ha), demarea/gapoktan (50 Ha), demunit/asosiasi (1.000 Ha)
3.	PENGORGANISASIAN BPP	
	1)	Struktur organisasi dan pembagiantugas pengelola dan tenaga
4.	BPP SEBAGAI LEMBAGA PERCONTOHAN DI WILAYAHNYA	
	1)	Menjadi pusat pembelajaran pengembangan pertanian dan pelayanan masyarakat di wilayahkecamatan.
B.	ASPEK KETENAGAAN	
1.	KETENAGAAN PENGELOLA BALAI PENYULUHAN KECAMATAN	
	A.	PENGELOLA BPP
	1)	Pimpinan Balai(Kepala/Koordinator);
	2)	Urusan Ketata Usahaan.
	B.	TENAGA FUNGSIONAL PENYULUH
	1)	Ketersediaan Penyuluh Urusan Program, Urusan Sumber Daya dan Urusan Supervisi sesuaiKriteria ;
	2)	Ketersediaan Penyuluh Pertaniandi WKPP sesuai Kebutuhan PotensiWilayah BPP;

NO.	VARIABEL
C.	ASPEK PENYELENGGARAAN
1.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DI KECAMATAN
	A. PERENCANAAN MANAJEMEN BPP
	Dokumen perencanaan pengelolaan BPP terdiri dari:
	1) Data identifikasi potensi wilayah dan permasalahan perilaku petani;
	2) Data inventarisasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
	3) Penetapan skala prioritas pengembangan usaha;
	4) Pemetaan komoditas unggulan;
	5) Dokumen rencana kebutuhan administrasi sarana dan prasana
	B. PROGRAM PENYULUHAN
	Dokumen Program Penyuluhan di Kecamatan meliputi:
	1) Data hasil identifikasi masalah perilaku pelaku utama (PRA/Kaji Tindak);
	2) Data hasil identifikasi kebutuhan pengembangan usaha pelaku utama (RDK/RDKK);
	3) Notulen Penyusunan Program Penyuluhan yang melibatkan petani dan penyuluh melalui mimbar sarasehan;
	4) Rumusan Program;

NO.	VARIABEL
C.	ASPEK PENYELENGGARAAN
2.	PELAKSANAAN DAN FASILITASI PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN SUDAH DILAKSANAKAN SESUAI PERATURAN YANG ADA
	1) Rencana Kerja Tahunan Penyuluh;
	2) Jadwal latihan dan kunjungan(LAKU);
	3) Laporan pelaksanaan kegiatan;
3.	MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA
	BPP sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pertanian di Kecamatan yang meliputi:
	1) Rencana kegiatan peningkatan dan pengembangan program;
	2) Dukungan peneliti pendamping dalam penerapan rekomendasi spesifik lokasi;
	3) Dukungan petugas teknis RIHP sesuai dengan tupoksinya;
	4) Pengawasan dan pendampingan penyuluh pada program pembangunan pertanian prioritas.
4.	KERJASAMA DAN KEMITRAAN PENYULUHAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN BERJALAN BAIK
	1) Jumlah dan bentuk kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta;

NO.	VARIABEL
C.	ASPEK PENYELENGGARAAN
5.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI DILAKUKAN SECARA TERTIB DAN TERATUR
	1) Adanya instrumen supervisi, monitoring dan evaluasi;
	2) Jadwal supervisi, monitoring dan
	3) Laporan dan umpan balik.
6.	PARTISIPASI DAN DUKUNGAN PETANI DIWILAYAHNYA SANGAT TINGGI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
	1) BPP menjadi tempat pertemuan dan konsultasi petani dan penyuluh swadaya;
	2) Kontribusi petani dalam kegiatan rebug tani, mimbar sarasehan, program, dan percontohan;
	3) BPP sebagai wadah pembinaan wanita tani dan pemuda tani;
7.	PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKITARNYA SANGAT BAIK
	1) Percontohan pengelolaan perkantoran dan usahatani berwawasan lingkungan
8.	TERBENTUKNYA KAWASAN/ CLUSTER PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN DI KECAMATAN
	1) Adanya pengembangan kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan yang dilakukan oleh pelaku utama dan pelaku usaha;
	2) Data hasil peningkatan produktivitas komoditas unggul kawasan;
	3) Data peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.

NO.	VARIABEL
D.	ASPEK SARANA DAN PRASARANA
1.	SARANA DAN PRASARANA MEMENUHI STANDAR MINIMAL
	1) Sarana ke informasian;
	2) Sarana alat bantu penyuluhan;
	3) Sarana peralatan administrasi;
	4) Sarana alat transportasi;
	5) Sarana perpustakaan;
	6) Sarana perlengkapan ruangan);
	7) Prasarana perkantoran;
	8) Prasarana lingkungan;
	9) Prasarana penunjang
E.	ASPEK PEMBIAYAAN
1.	PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN ADMINISTRASI SESUAI PERATURAN YANG ADA (BAGI BPP YANG MENDAPATKAN DANA APBN/DEKON DAN/ATAU APBD)
	<p>Adanya pengelolaan anggaran yang tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi pembiayaan Operasiona, Pertemuan-pertemuan, percontohan, penyediaan dan penyebaran informasi, Pembelajaran petani, peningkatan kapasitas penyuluh, peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan ekonomi petani serta kemitraan.</p>